PRAKTIK KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DI UPT SPF SDN 104214 DELITUA

Risa Manuella[1], Nancy Elina Putri Sihombing[2],Winara[3],Ibrahim Gultom[4]
[1]DIKDAS Universitas Negeri Medan,[2] DIKDAS Universitas Negeri Medan,[3] DIKDAS Universitas Negeri Medan,[4] DIKDASUniversitas Negeri Medan
[1]risamanuella2102@gmail.com, [2]nancysihombing69@gmail.com ,
[3]Winara@unimed.ac.id, [4]ib_gul@yahoo.com

ABSTRACT

Principal leadership is an important element of school management because it relates to communication, teacher participation, task allocation, and support for teaching practices. This study aims to analyze principal leadership practices at UPT SPF SDN 104214 Delitua based on observation and teacher interviews. The study employed a descriptive qualitative approach. Information was collected through direct observation in October 2026 and interviews using a guide containing 18 questions. The interview summary indicates that teachers are given opportunities to express their views when school programs and learning activities are discussed. Issues involving several teachers are discussed before solutions are determined, while certain administrative matters or urgent situations may be decided directly by the principal. The interviews also describe task allocation according to responsibilities and school needs, teacher discretion in selecting teaching methods within curriculum requirements, and support for training and professional development. These findings suggest a participative-consultative leadership pattern in which decision-making is adapted to context. The practices can be interpreted through participative and distributed leadership perspectives, although their overall effectiveness cannot be established from the available data. The study highlights the importance of communication, teacher participation, and role coordination in supporting primary school management.

Keywords: *principal leadership; teacher participation; decision-making; distributed leadership; primary school.*

ABSTRAK

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan unsur penting dalam pengelolaan pendidikan karena berkaitan dengan komunikasi, pelibatan guru, pembagian tugas, dan dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik gaya kepemimpinan kepala sekolah di UPT SPF SDN 104214 Delitua berdasarkan observasi dan wawancara guru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi langsung pada Oktober 2026 dan wawancara dengan pedoman yang terdiri atas 18 pertanyaan. Ringkasan wawancara menunjukkan bahwa guru diberi kesempatan menyampaikan pendapat dalam pembahasan program sekolah dan kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang melibatkan beberapa guru dibicarakan terlebih

dahulu, sedangkan urusan administratif tertentu atau keadaan mendesak dapat diputuskan langsung oleh kepala sekolah. Wawancara juga menggambarkan pembagian tugas berdasarkan tanggung jawab dan kebutuhan sekolah, keleluasaan guru memilih metode pembelajaran dalam batas kurikulum, serta dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. Temuan tersebut menunjukkan kecenderungan kepemimpinan partisipatif-konsultatif dengan pengambilan keputusan yang menyesuaikan konteks. Praktik ini dapat dibaca melalui perspektif kepemimpinan partisipatif dan kepemimpinan terdistribusi, meskipun efektivitasnya belum dapat dinilai secara menyeluruh dari data yang tersedia. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi, partisipasi guru, dan koordinasi peran dalam mendukung pengelolaan sekolah dasar.

Kata kunci: gaya kepemimpinan; partisipasi guru; pengambilan keputusan; kepemimpinan terdistribusi; sekolah dasar.

A. Pendahuluan

Sekolah dasar merupakan lingkungan pendidikan yang memerlukan pengelolaan terarah agar kegiatan pembelajaran, program sekolah, dan tanggung jawab warga sekolah dapat berjalan selaras. Pengelolaan satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan; ketiganya merupakan satu kesatuan yang mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah berperan mengarahkan kegiatan dan mengoordinasikan unsur organisasi, tetapi pelaksanaan program juga membutuhkan partisipasi dan tanggung jawab guru.

Kepemimpinan sekolah tidak cukup dipahami sebagai kewenangan formal untuk memberikan perintah. Praktik kepemimpinan juga tercermin melalui cara informasi disampaikan, pendapat guru dipertimbangkan, persoalan ditangani, pekerjaan dibagikan, dan kompetensi pendidik dikembangkan. Wati et al. (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dasar dapat dianalisis melalui berbagai peran, termasuk sebagai pemimpin, supervisor, administrator, inovator, dan motivator. Perspektif ini menegaskan bahwa kepemimpinan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan pendidikan yang saling terkait.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis hubungan kepala sekolah dan guru adalah kepemimpinan demokratis atau

partisipatif. Pendekatan ini menaruh perhatian pada ruang bagi guru untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Romenza et al. (2024), misalnya, menelaah penerapan kepemimpinan demokratis di sebuah sekolah dasar dengan fokus pada partisipasi guru dalam pengambilan keputusan. Penelitian tersebut memberikan pembanding konseptual bagi kajian tentang pelibatan guru, tanpa berarti bahwa praktik di sekolah yang berbeda dapat langsung disamakan.

Selain partisipasi, pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi aspek penting dalam pengelolaan sekolah. Perspektif kepemimpinan terdistribusi memandang praktik kepemimpinan sebagai proses yang melibatkan lebih dari satu pelaku, dengan perhatian pada hubungan antara pemimpin formal, anggota organisasi, dan konteks pelaksanaan tugas. Nadeem (2024) menjelaskan pentingnya visi bersama, kejelasan peran, komunikasi, serta pengembangan profesional dalam pembahasan kepemimpinan terdistribusi. Perspektif ini membantu menelaah pembagian tugas sekolah, tetapi keberadaan struktur bidang saja belum membuktikan bahwa kepemimpinan telah terdistribusi secara efektif.

Kajian tentang kepemimpinan dan lingkungan kerja sekolah juga memberi alasan untuk menelaah aspek komunikasi serta dukungan terhadap guru. Ideswal et al. (2020) mengkaji kontribusi iklim sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. Mulyani et al. (2020) juga menemukan hubungan positif antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, dan efektivitas sekolah dalam penelitian berskala lebih luas. Kedua penelitian tersebut menunjukkan relevansi tema kepemimpinan dalam pengelolaan pendidikan. Namun, temuan tersebut tidak boleh dipindahkan langsung sebagai kesimpulan kausal untuk sekolah yang diteliti dalam artikel ini, karena desain dan cakupan datanya berbeda.

Dalam pengamatan awal di UPT SPF SDN 104214 Delitua pada Oktober 2026, peneliti melihat bahwa kepala sekolah berkomunikasi dengan guru secara bersahabat, tetap memberikan arahan, dan membuka ruang diskusi ketika diperlukan. Dokumen wawancara guru yang digunakan dalam penelitian ini juga

memuat informasi mengenai kesempatan menyampaikan pendapat, cara menangani perbedaan, pembagian tugas, dukungan terhadap kompetensi guru, dan keleluasaan dalam memilih metode pembelajaran. Data tersebut menyediakan dasar yang lebih spesifik untuk membahas praktik kepemimpinan daripada hanya menilai karakter pribadi pemimpin.

Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan: (1) bagaimana praktik kepemimpinan partisipatif terlihat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan; (2) bagaimana pembagian tugas serta dukungan terhadap guru dilaksanakan menurut keterangan wawancara; dan (3) apa implikasi temuan tersebut bagi pengelolaan sekolah dasar. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis kecenderungan praktik kepemimpinan di UPT SPF SDN 104214 Delitua dengan menghubungkan data lapangan dan kajian teoretis yang relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik kepemimpinan berdasarkan situasi yang diamati dan informasi yang terdokumentasi melalui wawancara. Penelitian dilaksanakan di UPT SPF SDN 104214 Delitua pada Oktober 2026 sebagai bagian dari mini riset mata kuliah Kepemimpinan pada Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan guru. Observasi mencakup suasana sekolah, komunikasi kepala sekolah dengan guru yang terlihat, pembagian peran, kegiatan pembelajaran saat kunjungan, dan interaksi guru dengan peserta didik. Dokumen wawancara yang menjadi dasar penyusunan artikel memuat 18 pertanyaan mengenai komunikasi dan arahan, kesempatan guru memberikan masukan, pengambilan keputusan, pembagian tugas, keleluasaan melaksanakan pembelajaran, dukungan profesional, penyelesaian masalah, motivasi, kendala kerja, dan peluang perbaikan pengelolaan sekolah.

Jumlah informan, karakteristik informan, tanggal pasti wawancara, durasi wawancara, dan cara pemilihan informan belum tercantum secara rinci dalam bahan yang diterima. Informasi tersebut perlu dilengkapi berdasarkan pelaksanaan sebenarnya sebelum

artikel dikirimkan ke jurnal. Jawaban pada dokumen wawancara berbentuk ringkasan, sehingga hasil dalam artikel disajikan sebagai parafrasa dan bukan kutipan langsung.

Analisis dilakukan dengan membaca ringkasan observasi dan wawancara, mengelompokkan informasi ke tema-tema yang berulang, lalu menginterpretasikannya menggunakan kerangka kepemimpinan partisipatif-konsultatif, responsivitas pengambilan keputusan, pembagian peran, dan dukungan terhadap pengembangan guru. Peneliti membedakan data lapangan dari penafsiran teoretis. Karena informasi yang tersedia belum memuat prosedur triangulasi atau pemeriksaan informan secara formal, artikel tidak menyatakan bahwa triangulasi telah dilaksanakan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pola Komunikasi dan Akses Guru terhadap Informasi

Ringkasan wawancara menjelaskan bahwa kepala sekolah menyampaikan informasi melalui rapat guru atau secara langsung apabila terdapat hal yang perlu segera dibicarakan. Arahan diberikan untuk membantu guru memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Keputusan yang telah ditetapkan juga disampaikan melalui rapat atau pemberitahuan langsung, disertai penjelasan mengenai tugas dan tujuan kegiatan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi digunakan sebagai bagian dari koordinasi pekerjaan, bukan semata-mata penyampaian perintah. Informasi mengenai cara penyampaian arahan dan penjelasan tugas menunjukkan perhatian terhadap pemahaman guru atas pelaksanaan kegiatan sekolah. Dalam pengelolaan organisasi, penjelasan mengenai tujuan dan tugas dapat membantu mengurangi ketidakjelasan peran, meskipun penelitian ini tidak mengukur secara langsung tingkat pemahaman guru setelah arahan diberikan.

Temuan ini dapat dibahas sebagai unsur dasar kepemimpinan partisipatif-konsultatif karena saluran komunikasi formal melalui rapat berjalan berdampingan dengan komunikasi langsung. Meski begitu, keberadaan rapat tidak otomatis berarti semua guru memiliki pengaruh yang sama dalam keputusan. Bukti wawancara lebih kuat mendukung kesimpulan bahwa terdapat saluran

komunikasi untuk penyampaian informasi dan masukan. Kajian Wati et al. (2022) relevan karena menempatkan fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan dan koordinasi pendidikan.

4.2 Pelibatan Guru dalam Pembahasan dan Pengambilan Keputusan

Aspek paling menonjol dari wawancara adalah kesempatan guru untuk menyampaikan pendapat dan masukan, terutama dalam pembahasan program sekolah dan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan yang melibatkan banyak guru, kepala sekolah biasanya mengadakan rapat dan memberi ruang bagi guru menyampaikan pertimbangan. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan, sedangkan keputusan akhir disesuaikan dengan tujuan dan kondisi sekolah.

Informasi tersebut mendukung interpretasi bahwa pola kepemimpinan yang tampak memiliki kecenderungan partisipatif-konsultatif. Istilah partisipatif merujuk pada kesempatan guru berkontribusi dalam pembahasan, sedangkan konsultatif menegaskan bahwa guru dapat dimintai masukan sementara tanggung jawab penetapan keputusan tetap berada pada kepala sekolah sesuai kebutuhan dan kewenangannya. Pola ini lebih akurat menggambarkan ringkasan wawancara daripada memberi label demokratis secara mutlak.

Wawancara juga menunjukkan adanya ruang untuk membicarakan perbedaan pendapat sebelum penyelesaian ditentukan. Guru dapat menyampaikan kritik atau ketidaksetujuan dengan cara yang baik, lalu masukan dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kondisi sekolah. Cara ini mengindikasikan adanya prosedur konsultasi dalam menangani perbedaan, meskipun data belum menjelaskan contoh kasus tertentu atau bagaimana keputusan akhir diterima oleh pihak terkait.

Hasil ini sejalan secara konseptual dengan Romenza et al. (2024), yang menelaah peran musyawarah dan diskusi terbuka dalam partisipasi guru pada pengambilan keputusan. Minsih et al. (2019) juga membahas praktik kepemimpinan demokratis-monarkis pada konteks sekolah dasar, termasuk keputusan yang dilakukan bersama. Penelitian terdahulu

tersebut menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan di sekolah tidak selalu dapat dipadatkan ke satu label sederhana; perlu diperhatikan hubungan antara partisipasi dan otoritas formal.

Meski demikian, penelitian ini tidak mengamati secara langsung rapat yang dimaksud. Oleh karena itu, hasil mengenai pelibatan guru terutama bersumber dari ringkasan jawaban wawancara, bukan catatan observasi terhadap jalannya pengambilan keputusan. Pengumpulan data lanjutan dapat menambahkan pengamatan rapat atau meminta contoh konkret dari informan agar analisis mengenai partisipasi menjadi lebih kuat.

4.3 Pengambilan Keputusan yang Menyesuaikan Konteks

Wawancara menggambarkan bahwa proses pengambilan keputusan bergantung pada jenis persoalan. Keputusan yang berhubungan dengan program sekolah atau kegiatan yang melibatkan banyak guru umumnya dibicarakan bersama. Sebaliknya, urusan administratif tertentu atau masalah mendesak dapat ditangani langsung oleh kepala sekolah. Ringkasan wawancara juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah didahului upaya memahami penyebab, dan pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaan.

Pola ini menunjukkan pengambilan keputusan yang responsif terhadap situasi. Dalam persoalan kolektif, konsultasi memungkinkan masukan dari pihak yang akan menjalankan keputusan. Dalam kondisi yang mendesak, keputusan langsung dapat diperlukan agar penanganan tidak tertunda. Data tidak menunjukkan bahwa salah satu pola selalu digunakan dalam semua situasi; sebaliknya, jawaban guru menekankan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan urgensi.

Secara analitis, pola tersebut mendukung karakter kepemimpinan partisipatif-konsultatif yang dilengkapi kewenangan langsung ketika diperlukan. Penafsiran ini lebih tepat daripada menyebut kepala sekolah sepenuhnya demokratis atau sepenuhnya otoriter. Penelitian ini juga tidak menetapkan teori kepemimpinan situasional tertentu karena data yang tersedia tidak cukup untuk menguji keseluruhan indikator model tersebut. Istilah “responsif terhadap konteks” dipakai sebagai

deskripsi pola keputusan berdasarkan keterangan wawancara.

Implikasi bagi pengelolaan sekolah adalah perlunya memperjelas jenis keputusan yang memerlukan konsultasi, mekanisme penyampaian masukan, dan ruang lingkup kewenangan kepala sekolah. Kejelasan tersebut dapat membantu menjaga partisipasi tanpa mengabaikan kebutuhan untuk bertindak cepat dalam keadaan mendesak. Implikasi ini adalah rekomendasi berdasarkan analisis, bukan bukti bahwa seluruh prosedur formal tersebut sudah tertulis atau telah dievaluasi di sekolah.

4.4 Pembagian Tugas, Otonomi Guru, dan Pengorganisasian Pekerjaan

Ringkasan wawancara menunjukkan bahwa pembagian tugas disesuaikan dengan tanggung jawab, kemampuan, dan kebutuhan sekolah. Setiap guru diberikan tugas tertentu agar pembelajaran dan program sekolah dapat berlangsung teratur. Pada aspek pembelajaran, guru memiliki keleluasaan memilih metode sesuai kebutuhan peserta didik, dengan tetap mengikuti kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut menggambarkan dua dimensi pengelolaan yang saling terkait: kejelasan pembagian tugas organisasi dan ruang profesional guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembagian tugas membantu pengaturan kegiatan bersama, sedangkan keleluasaan memilih metode menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak seluruhnya ditentukan melalui instruksi yang seragam. Dengan demikian, praktik kepemimpinan yang tergambar bukan hanya pengawasan, tetapi juga penataan tanggung jawab disertai ruang profesional bagi guru.

Dari perspektif kepemimpinan terdistribusi, pembagian peran merupakan pintu masuk untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab kepemimpinan dan pengelolaan dilaksanakan oleh beberapa pihak. Nadeem (2024) menekankan pentingnya kejelasan peran, visi bersama, komunikasi, dan pengembangan profesional dalam implementasi distributed leadership. Namun, penelitian ini belum memiliki data terperinci tentang kewenangan dan praktik kerja tiap bidang; karena itu, temuan lebih tepat disebut pembagian tanggung jawab yang

teridentifikasi, bukan bukti penuh efektivitas kepemimpinan terdistribusi.

Keleluasaan guru memilih metode juga harus dibaca dalam batas kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Jawaban wawancara menyebutkan bahwa usulan metode baru dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan murid; jika memungkinkan, guru dapat mencoba metode tersebut. Ini menunjukkan orientasi pada pertimbangan pedagogis, tetapi data belum memuat contoh metode yang pernah diuji atau hasil evaluasinya. Oleh sebab itu, pembahasan berfokus pada prinsip pertimbangan terhadap kebutuhan belajar, bukan klaim inovasi pembelajaran yang telah terbukti meningkatkan hasil belajar.

4.5 Dukungan terhadap Kesulitan dan Pengembangan Profesional Guru

Wawancara menggambarkan bahwa ketika guru menghadapi kesulitan, kepala sekolah meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dan membantu mencari solusi melalui diskusi atau memberikan saran. Kepala sekolah juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan rekan kerja, mengembangkan kemampuan mengajar, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, motivasi diberikan melalui arahan, dukungan, dan apresiasi terhadap pekerjaan guru.

Temuan tersebut memperluas pemahaman tentang kepemimpinan karena peran kepala sekolah tidak hanya berhubungan dengan penetapan aturan dan keputusan, tetapi juga dengan dukungan terhadap pelaksanaan serta pengembangan profesi guru. Upaya mendengarkan kendala sebelum memberi saran memperlihatkan pola pemecahan masalah yang konsultatif. Dorongan mengikuti pelatihan dan mengevaluasi pembelajaran pula menunjukkan perhatian terhadap pengembangan kompetensi.

Wati et al. (2022) memasukkan peran kepala sekolah sebagai supervisor, inovator, dan motivator dalam kajian kepemimpinan sekolah dasar. Rujukan ini berkaitan dengan data wawancara yang menggambarkan dukungan terhadap guru dan keterbukaan terhadap metode pembelajaran baru. Meski begitu, dukungan profesional tidak otomatis membuktikan bahwa supervisi akademik formal sudah berjalan; informasi tentang jadwal

supervisi, observasi kelas, dan umpan balik terdokumentasi belum tersedia.

Dalam konteks yang lebih luas, Mulyani et al. (2020) menemukan hubungan positif antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, dan efektivitas sekolah berdasarkan penelitian kuantitatif berskala besar. Penelitian tersebut memberi alasan untuk memberi perhatian pada dukungan kepemimpinan, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa tindakan kepala sekolah di lokasi penelitian ini telah meningkatkan kinerja guru. Klaim mengenai dampak memerlukan data khusus, misalnya perubahan praktik mengajar, refleksi guru, atau indikator kinerja yang dapat ditelusuri.

4.6 Kendala Kerja sebagai Peluang Pengembangan Pengelolaan Sekolah

Ringkasan wawancara mengidentifikasi beberapa tantangan yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas guru, yaitu keterbatasan sarana pembelajaran, banyaknya tugas administratif, dan kesulitan menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan peserta didik. Jawaban mengenai hal yang perlu diperbaiki menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan koordinasi, penyampaian informasi tugas yang lebih jelas, serta ketersediaan ruang bagi guru untuk memberi masukan.

Temuan ini dapat dibahas secara konstruktif sebagai kebutuhan pengelolaan yang umum dijumpai dalam organisasi pendidikan, bukan sebagai penilaian negatif terhadap individu atau sekolah. Keterbatasan sarana, misalnya, merupakan kondisi yang perlu dianalisis bersama kebutuhan pembelajaran dan sumber daya yang tersedia. Beban administratif dapat pula memengaruhi waktu yang tersedia bagi guru untuk merencanakan dan merefleksikan pembelajaran. Namun, wawancara yang tersedia belum menjelaskan frekuensi, besaran, atau dampak terukur dari tantangan-tantangan tersebut.

Kebutuhan peningkatan koordinasi dan kejelasan informasi menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan dapat terus dikembangkan melalui mekanisme komunikasi yang terencana. Misalnya, pembagian tugas dan informasi program dapat disampaikan secara konsisten, sementara forum konsultasi dapat digunakan untuk memperjelas kebutuhan guru dan kendala pelaksanaan. Rekomendasi ini

diturunkan dari tema wawancara dan tidak berarti bahwa sekolah belum memiliki mekanisme komunikasi semacam itu.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 menetapkan bahwa pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Kerangka tersebut relevan sebagai acuan umum untuk menempatkan komunikasi, penataan tanggung jawab, dan koordinasi dalam proses pengelolaan. Penelitian ini tidak melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan tersebut; regulasi hanya digunakan sebagai konteks normatif dalam merumuskan implikasi.

4.7 Sintesis Gaya Kepemimpinan yang Tergambar dari Data

Berdasarkan keseluruhan jawaban wawancara, gaya kepemimpinan yang paling kuat terindikasi adalah partisipatif-konsultatif. Indikasinya meliputi kesempatan guru menyampaikan pendapat, diskusi untuk persoalan yang melibatkan beberapa guru, pertimbangan terhadap kritik dan masukan, serta upaya memahami persoalan sebelum menentukan penyelesaian. Ciri konsultatif terlihat karena keputusan akhir tetap mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan sekolah, dan kepala sekolah dapat mengambil keputusan langsung untuk urusan administratif tertentu atau kondisi mendesak.

Di samping itu, terdapat unsur dukungan terhadap pengembangan guru, antara lain melalui dorongan mengikuti pelatihan, diskusi dengan rekan kerja, evaluasi pembelajaran, bantuan menyelesaikan kesulitan, dan apresiasi terhadap pekerjaan. Data ini menunjukkan perilaku yang mendukung profesionalisme guru, tetapi belum cukup untuk menetapkan kepemimpinan transformasional atau instruksional sebagai gaya dominan. Penetapan gaya tersebut membutuhkan indikator dan bukti tambahan mengenai visi perubahan, pengaruh keteladanan, supervisi pembelajaran, serta evaluasi praktik mengajar.

Pembagian tugas menurut tanggung jawab, kemampuan, dan kebutuhan sekolah juga menunjukkan perhatian terhadap pengorganisasian kerja. Hal tersebut dapat dibahas melalui perspektif kepemimpinan terdistribusi pada tingkat awal, dengan catatan bahwa keberadaan pembagian bidang belum membuktikan secara penuh adanya

kolaborasi kepemimpinan di dalam praktik.

Karena itu, simpulan analitis yang paling proporsional adalah bahwa data wawancara menunjukkan kecenderungan kepemimpinan partisipatif-konsultatif dengan pengambilan keputusan yang responsif terhadap situasi, disertai praktik dukungan profesional dan pembagian tanggung jawab. Formulasi ini mencakup beberapa dimensi yang didukung data dan menghindari penyederhanaan kepemimpinan menjadi satu label tanpa batasan.

5. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, observasi yang dijelaskan peneliti dilakukan dalam satu kunjungan pada Oktober 2026 sehingga belum menggambarkan variasi kepemimpinan dalam beragam situasi sekolah. Kedua, dokumen wawancara yang tersedia menyajikan jawaban dalam bentuk ringkasan dan belum memuat transkrip verbatim, jumlah informan, karakteristik informan, atau tanggal pasti wawancara. Informasi ini perlu dilengkapi sebelum artikel diajukan.

Ketiga, proses rapat dan pengambilan keputusan tidak disaksikan langsung selama observasi. Oleh karena itu, penjelasan tentang pelibatan guru bersumber terutama dari ringkasan wawancara. Keempat, tidak tersedia data pengukuran tentang kinerja guru, mutu pembelajaran, atau efektivitas sekolah. Penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tertentu menyebabkan peningkatan pada aspek-aspek tersebut. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pengamatan terstruktur, melibatkan lebih dari satu sumber informan jika memungkinkan, dan mencatat contoh kejadian yang spesifik. Pemeriksaan ulang ringkasan hasil kepada informan atau triangulasi dengan dokumen kegiatan dapat dipertimbangkan apabila telah dilaksanakan atau direncanakan pada tahap penelitian berikutnya. Artikel ini tidak menyatakan prosedur validasi tersebut telah dilakukan jika belum ada bukti pelaksanaannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan ringkasan wawancara guru, praktik kepemimpinan kepala sekolah di UPT SPF SDN 104214 Delitua menunjukkan kecenderungan partisipatif-konsultatif.

Kecenderungan ini tampak pada kesempatan guru menyampaikan pendapat, pembahasan persoalan yang melibatkan beberapa guru, pertimbangan atas kritik dan masukan, serta upaya memahami persoalan sebelum penyelesaian ditentukan. Pengambilan keputusan juga digambarkan menyesuaikan konteks: program bersama dibahas melalui konsultasi, sedangkan urusan administratif tertentu atau situasi mendesak dapat ditangani secara langsung.

Selain pengambilan keputusan, data menunjukkan dukungan terhadap profesionalisme guru melalui bantuan dalam menghadapi kesulitan, dorongan mengikuti pelatihan, diskusi dengan rekan kerja, evaluasi pembelajaran, apresiasi, dan ruang untuk mempertimbangkan metode pembelajaran baru. Pembagian tugas berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, dan kebutuhan sekolah juga menjadi unsur pengorganisasian yang relevan. Temuan tersebut mendukung analisis kepemimpinan partisipatif-konsultatif, disertai unsur dukungan profesional dan pembagian peran. Namun, data belum cukup untuk menetapkan kepemimpinan transformasional, instruksional, atau terdistribusi sebagai gaya dominan secara menyeluruh, serta tidak membuktikan hubungan sebab-akibat dengan kinerja guru atau mutu sekolah. Kajian ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, ruang partisipasi, pengambilan keputusan yang sesuai situasi, serta koordinasi tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dasar. Penelitian lanjutan dengan dokumentasi wawancara yang lebih terperinci dan pengamatan berulang diperlukan untuk memperkuat kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ideswal, I., Yahya, Y., & Alkadri, H. (2020). Kontribusi iklim sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. Jurnal Basicedu, 4(2), 460–466. https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i2.381

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. https://peraturan.go.id/files/Permendikdasmen-no-26-tahun-2025.pdf

Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun sekolah berkualitas di sekolah dasar. Profesi Pendidikan Dasar, 6(1), 29–40. https://doi.org/10.23917/ppd.v6i1.8467

Mulyani, H., Meirawan, D., & Rahmadani, A. (2020). Increasing school effectiveness through principals' leadership and teachers' teaching performance, is it possible? Cakrawala Pendidikan, 39(2), 279–292. https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.28864

Nadeem, M. (2024). Distributed leadership in educational contexts: A catalyst for school improvement. Social Sciences & Humanities Open, 9, Article 100835. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100835

Romenza, L., Azhar, A., & Erni, E. (2024). Implementation of principal's democratic leadership style to improve teacher participation in decision making at State Elementary School 012 Naumbai. Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature, 4(001), 752–764. https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.502

Wati, D. P., Wahyuni, N., Fatayan, A., & Bachrudin, A. A. (2022). Analisis kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar. Jurnal Basicedu, 6(5), 7970–7977. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3684